

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, R.R.S.M., 2016. Peranan badan usaha milik desa (bumdes) pada kesejahteraan masyarakat pedesaan studi pada bumdes di gunung kidul, yogyakarta. *Modus*. Vol. 28, No. 2 Hal. 155-167
- Bachrein, S. (2010). Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi Pembangunan dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 8 No. 2, Juni 2010: 133-149.
- Bastian, I. 2007. *Sistem Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Kedua. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Cetakan ketiga. Erlangga: Jakarta
- Halim Herawaty (2012), *Tentang Akuntabilitas Publik*
- Halim, Abdul, 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta. , 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi*, UPP UMP YKPN, Yogyakarta.
- Halim, A. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Ketiga. Salemba Empat. Jakarta
- Hanifah, I.S., 2015. *Akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban anggaran pendapatan desa (APBDes)*. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*. Vol.4, No. 8 Hal.1-15
- Kasmir (2013: 7). (2005). *Pengertian Laporan Keuangan*.
- Kiasatina, A. (2017). Pelaksanaan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabu[paten Semarang. *Skripsi, 0711*.
- Khasanah, Uswatun. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Wanita Keluarga Sejahtera*. Skripsi. Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Kiasatina, A. (2017). Pelaksanaan Permendagri No.113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabu[paten Semarang. *Skripsi, 0711*.
- Krina, L.L.(2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Andi. Yogyakarta.
- Menurut PSAP No 13 *Laporan Keuangan Badan Layanan Umum*
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162. <https://ejurnal.id/index.php/jsak/issue/view/26>

- Nordin, F. N. 'Ain. (1384). Penelitian Kualitatif\_Bab 3 (p. 300).
- Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- Permendesa No 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes
- Permendesa Nomer 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa
- PKDSP (Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan). (2007). Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Posumah, H. (n.d.). *Abstrak PENDAHULUAN Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa , ditentuka.* 28–38.
- Probowulan, D. (2013). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prabowo, T.H.E. (2014). Developing BUMDes (Village-owned Enterprise) for Sustainable Poverty Alleviation Model Village Community Study in Bleberan-Gunung KidulIndonesia. *World Applied Sciences Journal* 30 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice): 19-26.
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Riyanto, Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Pembelajaran Perusahaan*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE
- Rahum, A. (2015). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pembangunan Fisik Desa Krayanmakmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 3(4), 1–14.
- Siregar, O. K., Hasibuan, H. A., & Erhan, A. Na. J. (2019). Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah Terhadap Kinerja Guru Di Smp Negeri 1 Tanjungbalai. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 57–71.
- Sudarmiati, N. K. D., Parwati, N. K. A. Y., Hardyanti, P. W., & Ratmadi, K. A. (2019). Penerapan Basis Akrual Pada Perusahaan Bumdes Dalam Keakuratan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BUMDes Dwi Amertha Sari Tahun 2017). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 120–132. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19962>
- Syariah, D. E., Negeri, I., & Kalijaga, S. (2018). *Penerapan Pola.* 28–37.
- Undang- Undang Nomer 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Bumdes
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Widjaja, A. W. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Bulat Dan Utuh*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.